

Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Paser Tuntas, Fahmi-Ikhwan Resmi Dilantik



SUMBER : KORANKALTIM JUMAT, 21/02/2025

TANA PASER – Fahmi Fadli dan Ikhwan Antasari resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Paser, Kamis (20/2). Fahmi dan Ikhwan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto bersamaan dengan ratusan kepala dan wakil kepala daerah lainnya, di Istana Merdeka, Jakarta.

Fahmi mengucapkan syukur dan terima kasih karena pelantikan mereka berjalan lancar. Pada periode kedua menjabat sebagai Bupati Paser didampingi Ikhwan Antasari, mereka bertekad akan segera merealisasikan visi misi Paser Tuntas yang merupakan kelanjutan dari Paser MAS.

Langkah-langkah percepatan dalam melaksanakan visi misi Paser Tuntas dengan melakukan koordinasi dengan seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemkab Paser untuk dapat segera membuat dokumen RPJMD, menyusun Renstra dan Renja agar Program Paser Tuntas di tahun 2026 dapat segera direalisasikan. "Dalam waktu dekat ini setelah dilantik segera membuat dokumen RPJMD, menyusun Renstra dan Renja bersama seluruh OPD di lingkungan Pemkab Paser," kata Bupati Fahmi usai dilantik menjadi bupati.

Bupati menyatakan, terkait dengan adanya efisiensi anggaran yang merupakan instruksi langsung Presiden RI Prabowo, dalam memerintah Fahmi-Ikhwan sama sekali tidak berpengaruh besar dan telah mempunyai langkah-langkah strategis dalam merealisasikan visi misi Paser Tuntas. "Kami rasa adanya efisien anggaran ini tidak berpengaruh besar terhadap masa pemerintah Fahmi-ikhwan, " ujarnya.

Wakil Bupati Ikhwan Antasari menambahkan, APBD Paser 2025 yang telah disahkan sebagian besar sudah masuk dalam visi misi Paser Tuntas dan diharapkan dalam 100 hari kerja pemerintah Fahmi-Ikhwan dapat berjalan dengan baik. "Dengan adanya efisien anggaran tentunya tidak berpengaruh besar, karena sebagian besar APBD Paser 2025 sudah masuk dalam visi misi Paser Tuntas," pungkasnya. **(dc/sh/ga)**

Sumber Berita :

1. Korankaltim, Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Paser Tuntas, Fahmi-Ikhwan Resmi Dilantik, 21/02/2025

Catatan :

Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

